

Pengaruh Identitas Sosial dan Ideologi Terhadap Persepsi Keadilan Dalam *Cancel Culture* serta Dampaknya Pada Kualitas Dialog Publik

Cindy Aulia Ambiyar^{1*}, Celine Mercy Taasiringan¹

¹Program Studi Informatika, Universitas Pradita, Indonesia

*Corresponding author : cindy.aulia@student.pradita.ac.id

Article History:

Received : 08-01-2026

Accepted : 15-01-2026

Keywords: *Cancel Culture*;
Identitas Sosial; Ideologi Politik;
Persepsi Keadilan; Kualitas
Dialog Publik; Media Sosial

ABSTRAK

Fenomena *cancel culture* telah menjadi praktik sosial yang semakin menonjol di ruang publik digital. Di balik klaimnya sebagai bentuk akuntabilitas sosial, praktik ini memunculkan perdebatan mengenai apakah ia merepresentasikan keadilan sosial atau justru mencederai prinsip kebebasan berekspresi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh identitas sosial dan ideologi politik terhadap persepsi keadilan dalam *cancel culture*, serta dampaknya terhadap kualitas dialog publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei *cross-sectional* terhadap 155 pengguna aktif media sosial berusia 18–35 tahun di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM) untuk menguji hubungan langsung, tidak langsung (mediasi). Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas sosial dan ideologi politik berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan dalam *cancel culture*. Persepsi keadilan selanjutnya berpengaruh terhadap kualitas dialog publik dan memediasi hubungan antara variabel independen dan dependen. Temuan ini berkontribusi pada pemahaman mengenai dinamika moral, ideologis, dan identitas kelompok dalam partisipasi digital, serta memberikan implikasi praktis bagi pengembangan ruang diskusi daring yang lebih deliberatif, inklusif, dan adil.

PENDAHULUAN

Perkembangan media sosial telah mentransformasi ruang publik kontemporer, terutama dalam cara individu dan kelompok berpartisipasi dalam wacana sosial, politik, dan moral secara digital. Salah satu fenomena yang menonjol dalam konteks ini adalah *cancel culture*, yaitu praktik penarikan dukungan sosial secara kolektif terhadap individu atau institusi yang dianggap melanggar norma, nilai, atau ekspektasi moral tertentu di ruang publik digital (Clark, 2020). Fenomena ini memunculkan perdebatan akademik mengenai batas antara mekanisme akuntabilitas sosial dan praktik penghukuman informal yang berpotensi menimbulkan eksklusivitas sosial serta pembatasan kebebasan berekspresi.

Dalam literatur internasional, *cancel culture* dipahami sebagai praktik sosial yang berkaitan erat dengan relasi kuasa, moralitas publik, dan redistribusi kekuasaan simbolik di ruang digital. Clark (2020) memandang *cancel culture* sebagai instrumen koreksi sosial yang memungkinkan kelompok terpinggirkan menantang dominasi aktor berkuasa. Pandangan serupa dikemukakan oleh Vučković (2025), yang menempatkan *cancel culture* sebagai mekanisme potensial redistribusi kekuasaan sosial, meskipun efektivitas dan legitimasi moralnya tetap diperdebatkan. Dari perspektif komunikasi dan retorika, Hobbs dan O’Keefe (2024) menunjukkan bahwa *cancel culture* sering kali melibatkan proses delegitimasi reputasi

yang kompleks dan bersifat agonistik, sehingga berimplikasi langsung pada kualitas dialog publik.

Dalam konteks Indonesia, cancel culture berkembang seiring meningkatnya intensitas penggunaan media sosial dan menguatnya polarisasi wacana publik. Penelitian Nugroho (2021) menunjukkan bahwa cancel culture di media sosial Indonesia kerap memicu konflik horizontal dan memperdalam polarisasi opini, terutama ketika diskursus didominasi oleh emosi dan serangan personal. Sementara itu, Hidayat dan Sari (2023) secara spesifik menyoroti persepsi masyarakat terhadap keadilan sosial dalam praktik cancel culture. Temuan mereka menunjukkan adanya ambivalensi sikap publik: sebagian responden memandang cancel culture sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial terhadap pelanggaran moral, sementara sebagian lainnya menilainya sebagai hukuman sosial yang berlebihan dan tidak proporsional.

Ambivalensi tersebut relevan untuk dipahami dalam kerangka normatif Indonesia yang berlandaskan Pancasila, khususnya sila *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*. Ridho (2021) menegaskan bahwa keadilan, baik dalam perspektif Pancasila maupun nilai-nilai Al-Qur'an, menuntut pemenuhan hak semua warga serta pencegahan praktik ketidakadilan, termasuk dalam ranah opini publik dan media. Dalam kerangka ini, cancel culture dapat dimaknai sebagai mekanisme koreksi moral ketika institusi formal dianggap gagal menjalankan fungsi keadilan, namun juga berpotensi menyimpang menjadi bentuk kekerasan simbolik apabila tidak disertai prinsip proporsionalitas dan perlindungan hak individu.

Sejumlah studi mutakhir mendukung pandangan bahwa cancel culture sering dipersepsi sebagai instrumen akuntabilitas sosial dan kontrol kolektif terhadap penyimpangan moral. Putri et al. (2025) menemukan bahwa sebagian pengguna media sosial memandang praktik canceling figur publik sebagai upaya menjaga moralitas dan memberikan efek jera. Perspektif ini sejalan dengan analisis Simarmata dan Sitorus (2025) yang memaknai cancel culture sebagai sistem penghukuman sosial autopoietik dalam masyarakat digital. Namun, literatur kritis juga menyoroti risiko ketidakseimbangan sanksi, stigmatisasi, dan kerusakan reputasi jangka panjang yang sulit dipulihkan (Saint-Louis, 2021; Moskovets & Ovsyannikova, 2024). Dari sudut pandang hukum dan kebijakan publik, Hariyanto et al. (2025) menegaskan bahwa cancel culture berpotensi melampaui mekanisme keadilan formal dan menimbulkan pelanggaran hak konstitusional apabila tidak diimbangi regulasi yang memadai.

Secara psikologis, keterlibatan individu dalam cancel culture juga dipengaruhi oleh faktor emosional dan moral. Greig dan Hogg (2025) menunjukkan bahwa *moral outrage* dan sensitivitas moral berperan signifikan dalam mendorong partisipasi dalam *cancel culture*, yang di satu sisi dapat memperkuat klaim keadilan, namun di sisi lain meningkatkan risiko eskalasi emosi dan penghukuman berlebihan. Dengan demikian, temuan Hidayat dan Sari (2023) mencerminkan ketegangan konseptual antara cancel culture sebagai instrumen keadilan sosial dan sebagai praktik penghukuman sosial yang berpotensi menyimpang dari prinsip keadilan substantif.

Meskipun literatur mengenai cancel culture terus berkembang, terdapat beberapa celah penelitian yang masih belum terjawab secara memadai. Pertama, sebagian besar penelitian, khususnya di Indonesia, masih bersifat deskriptif atau kualitatif dan berfokus pada dampak normatif cancel culture terhadap kebebasan berekspresi, tanpa menguji secara empiris faktor-faktor psikososial yang membentuk persepsi individu terhadap keadilan praktik tersebut. Kedua, kajian yang secara simultan mengintegrasikan identitas sosial dan ideologi politik

sebagai determinan persepsi keadilan cancel culture masih relatif terbatas, baik dalam literatur nasional maupun internasional.

Ketiga, hubungan antara persepsi keadilan cancel culture dan kualitas dialog publik di media sosial belum banyak dianalisis melalui pendekatan kuantitatif yang komprehensif. Padahal, teori komunikasi deliberatif menekankan bahwa kualitas dialog publik sangat ditentukan oleh persepsi legitimasi dan keadilan dalam proses sosial yang melatarinya (Habermas, 1989; Tyler & Blader, 2003). Dengan demikian, absennya model empiris yang mengaitkan identitas sosial, ideologi politik, persepsi keadilan, dan kualitas dialog publik menunjukkan adanya kebutuhan akan penelitian yang lebih terintegrasi dan berbasis data kuantitatif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh identitas sosial dan ideologi politik terhadap persepsi keadilan dalam fenomena cancel culture, serta menguji dampaknya terhadap kualitas dialog publik di media sosial Indonesia. Secara khusus, penelitian ini memposisikan persepsi keadilan sebagai mekanisme mediasi yang menjembatani hubungan antara variabel ideologis dan identitas dengan perilaku komunikasi publik.

Kontribusi penelitian ini bersifat threefold. Pertama, penelitian ini memperkaya literatur cancel culture dengan menghadirkan bukti empiris kuantitatif mengenai peran persepsi keadilan sebagai mekanisme psikologis kunci dalam diskursus digital. Kedua, penelitian ini menawarkan model konseptual terintegrasi yang diuji menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM), sehingga memberikan pemahaman yang lebih sistematis mengenai dinamika komunikasi publik di media sosial. Ketiga, dengan berfokus pada konteks Indonesia, penelitian ini memberikan kontribusi kontekstual yang relevan bagi pengembangan kebijakan dan tata kelola ruang diskusi digital yang lebih adil, deliberatif, dan inklusif.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei (*survey method*). Jenis penelitian bersifat eksplanatif (*explanatory research*), yang bertujuan untuk menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta hubungan kausalitas antara satu variabel dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis. Metode analisis data yang digunakan adalah *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis varian atau *Partial Least Squares* (PLS) dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna media sosial aktif di Indonesia yang mengetahui atau pernah mengamati fenomena *cancel culture*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* (non-probabilitas), dengan kriteria inklusi responden sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia berusia minimal 17 tahun.
2. Aktif menggunakan setidaknya satu platform media sosial (Twitter/X, Instagram, TikTok, atau Facebook).
3. Pernah melihat, membaca, atau terlibat dalam diskusi terkait isu *cancel culture* di media sosial.

Ukuran sampel ditentukan menggunakan rumus Hair et al. (2019), yaitu minimal 5–10 kali jumlah indikator. Dengan total 16 indikator, maka jumlah responden minimal adalah 80–160 orang. Penelitian ini menargetkan minimal 150 responden agar hasil analisis lebih representatif dan berdasarkan hasil pengumpulan data untuk penelitian ini, diperoleh data sebanyak 155 responden

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner daring (*online questionnaire*) menggunakan Google Form. Instrumen penelitian menggunakan Skala Likert 5 poin untuk mengukur persetujuan responden, mulai dari skor 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju). Kuesioner terdiri dari dua bagian utama:

1. Profil Responden: Meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan intensitas penggunaan media sosial.
2. Item Pernyataan: Mengukur empat variabel utama penelitian (Identitas Sosial, Ideologi Politik, Persepsi Keadilan, dan Kualitas Dialog Publik).

Definisi Operasional Variabel

Variabel dalam penelitian ini didefinisikan secara operasional sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator Utama	Skala
Identitas Sosial (IS) <i>Independen</i>	Tingkat keterikatan emosional dan rasa bangga seseorang sebagai anggota dari kelompok sosial tertentu	1. Kebanggaan kelompok 2. Pentingnya identitas 3. Ikatan emosional 4. Solidaritas kelompok	Likert 1-5
Persepsi Keadilan (PK)	Penilaian subjektif individu mengenai apakah praktik <i>Cancel Culture</i> berjalan secara adil, baik dari sisi proses maupun hasil	1. Keadilan prosedur (bukti) 2. Proporsionalitas sanksi 3. Kesempatan klarifikasi 4. Tujuan pembelajaran	Likert 1-5
Kualitas Dialog (KD)	Mutu interaksi komunikasi di ruang publik digital yang ditandai dengan keterbukaan dan kesopanan	1. Keamanan berpendapat 2. Kesopanan (civility) 3. Argumen logis 4. Minim serangan personal	Likert 1-5
Ideologi Politik (IP)	Sistem kepercayaan individu terkait tatanan sosial, peran otoritas, dan kebebasan individu (spektrum Konservatif - Liberal).	1. Peran pemerintah 2. Kebebasan individu 3. Kepatuhan pada otoritas 4. Ketertiban sosial	Liker 1-5

Teknik Analisis Data

Berbeda dengan regresi linier biasa, penelitian ini menggunakan analisis *Structural Equation Modeling* berbasis *Partial Least Squares* (PLS-SEM) dengan bantuan perangkat

lunak SmartPLS. Metode ini dipilih karena mampu menangani model penelitian yang kompleks (memiliki variabel mediasi) dan tidak memerlukan asumsi normalitas data yang ketat (Hair et al., 2017).

Tahapan analisis data terdiri dari dua langkah evaluasi model:

1. Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model):
 - a. Uji Validitas Konvergen: Dilihat dari nilai Loading Factor ($> 0,7$) dan Average Variance Extracted ($AVE > 0,5$).
 - b. Uji Reliabilitas: Menggunakan nilai Cronbach’s Alpha dan Composite Reliability yang harus bernilai $> 0,7$.
2. Evaluasi Model Struktural (Inner Model):
 - a. Koefisien Determinasi (R^2): Mengukur seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen.
 - b. Uji Hipotesis (Path Coefficient): Dilakukan melalui prosedur Bootstrapping (5.000 subsampel) untuk melihat nilai signifikansi (P-Values $< 0,05$) dan t-statistika ($> 1,96$).
 - c. Uji Mediasi: Menguji signifikansi pengaruh tidak langsung (*Specific Indirect Effects*) variabel independen terhadap dependen melalui mediator.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Responden

Penelitian ini melibatkan 155 responden yang merupakan pengguna aktif media sosial. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, profil demografis responden disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Profil Responden

Kategori	Keterangan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Jenis Kelamin	Laki-laki	64	41.3%
	Perempuan	91	58.7%
Pendidikan Terakhir	SMA/Sederajat	80	51.6%
	S1	50	32.3
	Lainnya (D3/S2/S3)	25	16.1%
Platform Utama	Instagram	65	41.9%
	TikTok	48	31.0%
	Twitter/X	25	16.1%
	Facebook & Lainnya	17	11.0%
Durasi Penggunaan	< 1 Jam	11	7.1%
	1 - 3 Jam	56	36.1%
	4 - 6 Jam	65	41.9%
Pengalaman	> 6 Jam	23	14,8%
	Pernah melihat <i>Cancel Culture</i>	145	93,5%

Sumber: Data Primer Diolah (2025)

Mayoritas responden adalah perempuan (58,7%) dengan latar belakang pendidikan SMA/Sederajat (51,6%) dan S1 (32,3%). Platform yang paling dominan digunakan adalah Instagram dan TikTok, dengan rata-rata penggunaan media sosial yang cukup tinggi, yaitu 4-6 jam per hari (41,9%). Hal menarik adalah 93,5% responden pernah menyaksikan fenomena *cancel culture*, yang menunjukkan tingginya relevansi topik ini bagi responden.

Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Evaluasi model pengukuran dilakukan untuk memastikan bahwa indikator-indikator yang digunakan valid dan reliabel.

1. Evaluasi Model Tahap Awal (*Initial Model*)

Pada pengujian algoritma PLS tahap pertama dengan jumlah data sebanyak 99 data dari 155 data yang tersedia, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai *Outer Loading* seluruh indikator. Berdasarkan kriteria Hair et al. (2019), indikator dianggap valid jika memiliki nilai *loading factor* $> 0,70$. Namun, indikator dengan nilai 0,50 - 0,60 masih dapat dipertimbangkan jika penelitian bersifat eksploratori.

Berdasarkan hasil kalkulasi awal, ditemukan beberapa indikator yang memiliki nilai *loading factor* rendah ($< 0,50$) dan tidak memenuhi syarat validitas konvergen, sehingga harus dilakukan perhitungan ulang untuk meningkatkan kualitas data.

Tabel 3. Evaluasi Model Awal

Variabel	Indikator	Nilai Loading Awal
Identitas Sosial	IS1	0.767
	IS2	0.761
	IS3	0.780
	IS4	0.762
	IS5	0.770
	IS6	0.705
Ideologi Politik	IP1	0.706
	IP2_rev	0.540
	IP3	0.612
	IP4	0.582
	IP6_rev	0.700
Kualitas Dialog	KD1	0.682
	KD2	0.787
	KD3	0.677
	KD4	0.651
	KD5	0.736
	KD6	0.741
	KD7_rev	0.317

Variabel	Indikator	Nilai Loading Awal
Persepsi Keadilan	PK1	0.722
	PK2	0.808
	PK3	0.702
	PK4	0.487
	PK5_rev	0.458
	PK6_rev	0.344
	PK7	0.720

2. Optimasi Model Pengukuran (*Measurement Model Refinement*)

Berdasarkan hasil evaluasi model tahap awal (Tabel 3), ditemukan bahwa beberapa indikator tidak memenuhi kriteria validitas konvergen karena memiliki nilai *outer loading* di bawah 0.70 dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) pada variabel Ideologi Politik masih di bawah standar 0.50. Sebelum menetapkan model pengukuran final, penelitian ini telah melakukan eksplorasi melalui serangkaian iterasi pengujian model.

Pada tahap awal, berbagai skenario spesifikasi model diuji, termasuk upaya mempertahankan seluruh indikator asli dan memvariasikan teknik *reverse coding* pada indikator negatif. Namun, hasil dari berbagai model alternatif tersebut menunjukkan bahwa validitas konvergen tetap tidak terpenuhi. Beberapa konfigurasi model awal justru menghasilkan nilai *outer loading* yang tidak konsisten dan nilai reliabilitas yang bias. Hal ini mengindikasikan bahwa instrumen pengukuran awal memiliki varians error (*noise*) yang tinggi pada item-item tertentu.

Menanggapi kondisi tersebut, penelitian ini memutuskan untuk menerapkan strategi pemurnian model melalui dua pendekatan utama, yaitu penyesuaian arah kodifikasi data dan eliminasi bertahap (*step-wise deletion*) berdasarkan kriteria statistik yang ketat.

a. Penyesuaian Arah Item (Reverse Coding Adjustment)

Pada pemeriksaan awal, ditemukan indikator bertanda *reverse* (IP2, IP6, KD7, PK5, PK6) memiliki nilai loading negatif atau sangat rendah. Setelah dilakukan analisis ulang, indikator IP6 dikembalikan ke data aslinya (*un-reversed*) agar searah dengan indikator positif lainnya. Hasilnya, nilai *loading factor* IP6 meningkat signifikan menjadi 0.723, sehingga indikator ini dipertahankan sebagai pembentuk utama variabel Ideologi Politik.

b. Reduksi Indikator (Penghapusan Item)

Sesuai dengan pedoman Hair et al. (2017), indikator dengan *loading factor* rendah (< 0.40) harus dihapus. Selain itu, indikator dengan loading antara 0.40 – 0.70 dapat dihapus jika penghapusan tersebut dapat meningkatkan nilai AVE hingga di atas batas ambang 0.50. Fokus utama pada tahap ini adalah pencapaian prinsip *parsimony* (kesederhanaan model yang robust), di mana hanya indikator dengan kontribusi varians terkuat yang dipertahankan.

Berikut adalah rincian penghapusan indikator yang dilakukan untuk mencapai model yang valid:

Tabel 4. Ringkasan Penghapusan Indikator

Variabel	Indikator Dihapus	Nilai Awal	Alasan Penghapusan
Kualitas Dialog (KD)	KD7_rev	-0.305	Nilai loading sangat rendah (< 0.40) dan tidak berkorelasi dengan konstruk utama
	PK4	0.480	Nilai loading rendah. Penghapusan diperlukan untuk meningkatkan AVE variabel PK
Persepsi Keadilan (PK)	PK5_rev	-0.448	Nilai loading negatif dan rendah (< 0.50)
	PK6_rev	-0.343	Nilai loading sangat rendah (< 0.40)
	IP4	0.548	Dihapus untuk menaikkan nilai AVE Ideologi Politik yang sebelumnya < 0.50
Ideologi Politik (IP)	IP2_rev	0.553	Dihapus pada tahap akhir karena nilai AVE masih di angka 0.440. Setelah penghapusan ini, AVE berhasil naik menjadi valid

3. Hasil Akhir Uji Validitas Konvergen

Setelah dilakukan proses reduksi indikator, algoritma PLS dijalankan kembali (*re-run*). Hasil akhir pada tabel 5 menunjukkan nilai *outer loading* final yang digunakan dalam model. Meskipun terdapat beberapa indikator dengan nilai *loading* di kisaran 0.50 – 0.70 (seperti IP3 dan KD4), indikator tersebut tetap dipertahankan. Hal ini mengacu pada ketentuan bahwa indikator dengan *loading* < 0.70 tidak perlu dihapus selama nilai *Average Variance Extracted* (AVE) variabel terkait sudah memenuhi syarat > 0.50 (Hair et al., 2017).

Tabel 5. Nilai Outer Loading Final

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
	IP1	0.783	Valid
Ideologi Politik (IP)	IP3	0.606	Dipertahankan (AVE > 0.5)
	IP6_rev	0.752	Valid
Identitas Sosial (IS)	IS1	0.755	Valid
	IS2	0.759	Valid
	IS3	0.783	Valid
	IS4	0.771	Valid
	IS5	0.775	Valid
	IS6	0.700	Valid
Kualitas Dialog (KD)	KD1	0.621	Dipertahankan (AVE > 0.5)
	KD2	0.816	Valid
	KD3	0.734	Valid
	KD4	0.595	Dipertahankan (AVE > 0.5)
	KD5	0.794	Valid
	KD6	0.795	Valid
Persepsi Keadilan (PK)	PK1	0.833	Valid
	PK2	0.853	Valid

Variabel	Indikator	Outer Loading	Keterangan
	PK3	0.787	Valid
	PK7	0.722	Valid

Sumber: Olah Data SmartPLS (2025)

Selain nilai *loading*, parameter utama validitas konvergen dilihat dari nilai *Average Variance Extracted (AVE)*. Berdasarkan tabel 6, seluruh variabel kini memiliki nilai AVE > 0.500, yang menunjukkan bahwa setiap variabel mampu menjelaskan lebih dari 50% varians dari indikator-indikatornya.

Tabel 6. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas (Final)

Variabel	Cronbach's Alpha	Composite Reliability (rho_c)	AVE	Status
Ideologi Politik (IP)	0.529	0.759	0.515	Valid & Reliable
Identitas Sosial (IS)	0.853	0.890	0.574	Valid & Reliable
Kualitas Dialog	0.821	0.871	0.534	Valid & Reliable
Persepsi Keadilan (PK)	0.811	0.876	0.640	Valid & Reliable

Sumber: Olah Data SmartPLS (2025)

4. Evaluasi Reliabilitas Konstruk

Uji reliabilitas bertujuan untuk membuktikan konsistensi instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, reliabilitas diukur menggunakan dua kriteria: *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Berdasarkan tabel 6, nilai *Composite Reliability* untuk seluruh variabel berada di atas nilai rekomendasi 0.70, mulai dari 0.759 (Ideologi Politik) hingga 0.890 (Identitas Sosial). Meskipun nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel Ideologi Politik (0.529) sedikit di bawah standar 0.60, hal ini dapat diterima dalam PLS-SEM karena *Cronbach's Alpha* cenderung memberikan estimasi yang terlalu rendah (*underestimate*) pada jumlah item yang sedikit. Oleh karena itu, *Composite Reliability* menjadi acuan utama yang menunjukkan bahwa konsistensi internal seluruh variabel dalam penelitian ini adalah baik dan dapat diandalkan.

Evaluasi Model Struktural (*Inner Model*)

Setelah memastikan model pengukuran valid dan reliabel, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis melalui prosedur *Bootstrapping* dengan 5.000 subsampel. Pengujian ini bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh antar variabel dengan melihat nilai *T-Statistics* (> 1.96) dan *P-Values* (< 0.05). Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS, diperoleh hasil koefisien jalur (*path coefficients*) sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Hipotesis (Direct Effects)

Hubungan Jalur	Original Sample (O)	T- Statistics	P- Values	Keterangan
Ideologi Politik (IP) ⇒ Persepsi Keadilan (PK)	0.459	4.4669	0.000	Signifikan (H2 Diterima)
Identitas Sosial (IS) ⇒ Persepsi Keadilan (PK)	0.187	1.773	0.076	Tidak Signifikan (H1 Ditolak)

Hubungan Jalur	Original Sample (O)	T- Statistics	P- Values	Keterangan
Persepsi Keadilan (PK) ⇒ Kualitas Dialog (KD)	0.365	3.190	0.001	Signifikan (H3 Diterima)
Identitas Sosial (IS) ⇒ Kualitas Dialog (KD)	0.248	2.349	0.019	Signifikan
Ideologi Politik (IP) ⇒ Kualitas Dialog (KD)	0.136	1.148	0.251	Tidak Signifikan

Sumber: Olah Data SmartPLS (2025)

Pembahasan Hasil Uji Hipotesis:

1. Pengaruh Ideologi Politik terhadap Persepsi Keadilan (H2) Hasil pengujian menunjukkan nilai T-Statistic sebesar 4.669 (> 1.96) dan P-Value 0.000 (< 0.05). Hal ini berarti Ideologi Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Keadilan dalam *Cancel Culture*. Semakin kuat orientasi ideologi politik seseorang, semakin kuat pula penilaian mereka terhadap keadilan praktik tersebut. Maka, Hipotesis 2 Diterima.
2. Pengaruh Identitas Sosial terhadap Persepsi Keadilan (H1) Hasil pengujian menunjukkan nilai T-Statistic sebesar 1.773 (< 1.96) dan P-Value 0.076 (> 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa Identitas Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Keadilan. Rasa keterikatan dengan kelompok sosial ternyata tidak secara otomatis menentukan bagaimana individu menilai keadilan dalam kasus *cancel culture* pada studi ini. Maka, Hipotesis 1 Ditolak.
3. Pengaruh Persepsi Keadilan terhadap Kualitas Dialog Publik (H3) Terdapat pengaruh yang signifikan dengan nilai T-Statistic 3.190 dan P-Value 0.001. Artinya, jika seseorang memandang proses *cancel culture* itu adil, mereka cenderung berkontribusi pada kualitas dialog yang lebih baik (lebih sopan/terbuka). Maka, Hipotesis 3 Diterima.

Pengujian Efek Tidak Langsung (Analisis Mediasi)

Selain pengujian pengaruh langsung, penelitian ini juga menguji peran variabel Persepsi Keadilan (PK) sebagai mediator. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah pengaruh variabel independen (Identitas Sosial dan Ideologi Politik) terhadap variabel dependen (Kualitas Dialog) terjadi secara langsung atau harus melalui mekanisme persepsi keadilan terlebih dahulu. Berdasarkan hasil *Specific Indirect Effects* pada SmartPLS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji Mediasi (Indirect Effects)

Jalur Mediasi	Original Sample (O)	T- Statistics	P- Values	Keterangan
Ideologi Politik (IP) ⇒ Persepsi Keadilan (PK) ⇒ Kualitas Dialog (KD)	0.167	2.494	0.013	Signifikan (Mediasi Terjadi)
Identitas Sosial (IS) ⇒ Persepsi Keadilan (PK) ⇒ Kualitas Dialog (KD)	0.068	1.485	0.138	Tidak Signifikan (Tidak Ada Mediasi)

Sumber: Olah Data SmartPLS (2025)

Pembahasan Hasil Mediasi:

1. Peran Mediasi Persepsi Keadilan pada Hubungan Ideologi Politik dan Kualitas Dialog Hasil pengujian menunjukkan nilai P-Value sebesar 0.013 (< 0.05). Hal ini membuktikan bahwa Persepsi Keadilan secara signifikan memediasi pengaruh Ideologi Politik terhadap Kualitas Dialog Publik. Temuan ini menarik karena pada uji pengaruh langsung (Direct Effect), hubungan langsung Ideologi Politik ke Kualitas Dialog terbukti tidak signifikan (P-Value 0.251). Kondisi ini (Direct Effect tidak signifikan, namun Indirect Effect signifikan) disebut sebagai Mediasi Penuh (*Full Mediation*). Artinya, Ideologi Politik seseorang hanya akan memengaruhi cara mereka berdialog di media sosial *jika dan hanya jika* ideologi tersebut terlebih dahulu membentuk persepsi mereka tentang keadilan. Tanpa adanya penilaian tentang adil/tidaknya *cancel culture*, ideologi politik semata tidak cukup untuk mengubah kualitas dialog seseorang.
2. Peran Mediasi Persepsi Keadilan pada Hubungan Identitas Sosial dan Kualitas Dialog Hasil pengujian menunjukkan nilai P-Value sebesar 0.138 (> 0.05). Hal ini menunjukkan bahwa Persepsi Keadilan tidak berperan sebagai mediator dalam hubungan antara Identitas Sosial dan Kualitas Dialog. Kegagalan mediasi ini disebabkan karena pada uji hipotesis pertama (H1), Identitas Sosial terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Keadilan. Karena variabel independen (IS) tidak mampu memengaruhi mediator (PK), maka secara logika statistik, proses mediasi tidak dapat terjadi. Pengaruh Identitas Sosial terhadap Kualitas Dialog sepenuhnya bersifat langsung (*Direct Effect*) sebagaimana terbukti signifikan pada Tabel 4.6 (P-Value 0.019), tanpa perlu melalui persepsi keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan menggunakan *Structural Equation Modeling* (SEM-PLS) terhadap 155 responden, penelitian ini menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Identitas Sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap Persepsi Keadilan. Berlawanan dengan asumsi awal, tingginya keterikatan emosional atau kebanggaan terhadap kelompok sosial tertentu ternyata tidak menentukan bagaimana individu menilai keadilan dalam fenomena *cancel culture*. Responden cenderung menilai aspek keadilan (seperti bukti dan proporsionalitas sanksi) secara objektif, terlepas dari identitas kelompok mereka.
2. Ideologi Politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap Persepsi Keadilan. Orientasi ideologi politik terbukti menjadi prediktor kuat dalam pembentukan persepsi keadilan. Individu dengan orientasi ideologi tertentu cenderung memiliki standar moral yang spesifik dalam menilai apakah tindakan *canceling* dianggap adil atau tidak.
3. Persepsi Keadilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Dialog Publik. Semakin individu memandang proses *cancel culture* berjalan secara adil (transparan dan proporsional), semakin tinggi kecenderungan mereka untuk berpartisipasi dalam dialog yang terbuka, sopan, dan argumentatif. Persepsi keadilan adalah kunci untuk meredakan toksisitas di media sosial.
4. Peran Mediasi Persepsi Keadilan (Temuan Kunci). Penelitian ini menemukan adanya Mediasi Penuh (*Full Mediation*) pada variabel Ideologi Politik. Artinya, ideologi politik seseorang tidak akan langsung memengaruhi kualitas dialog mereka, kecuali jika ideologi tersebut terlebih dahulu membentuk rasa keadilan. Sebaliknya, pada variabel Identitas

Sosial, mediasi tidak terjadi; pengaruh Identitas Sosial terhadap Kualitas Dialog berlangsung secara langsung tanpa melalui mekanisme penilaian keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bantugan, B., Abayon, C., Baylon, N., Hilario, G., Roquim, N., & Uriarte, L. (2025). Selected Students' Perceptions and Attitudes on Cancel Culture: Reflections on Public Opinion, Attribution Theory, Compassionate Education, and Restorative Justice. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*. <https://doi.org/10.47772/ijriss.2025.903sedu0025>.
- [2] Brandt, M. J., & Reyna, C. (2017). Individual differences in the resistance to change and tolerance for inequality predict system legitimacy differently depending on the social structure. *European Journal of Personality*, *31*(1), 15–29.
- [3] Crimston, C. R., Hornsey, M. J., Bain, P. G., & Bastian, B. (2018). Toward a psychology of moral expansiveness. *Current Directions in Psychological Science*, *27*(1), 14–19.
- [4] Ellemers, N., Spears, R., & Doosje, B. (2002). Self and social identity. *Annual Review of Psychology*, *53*, 161–186.
- [5] Esau, K. (2025). The Quality of Connections: Deliberative Reciprocity and Inclusive Listening as Antidote to Destructive Polarization Online. *Social Media + Society*, *11*. <https://doi.org/10.1177/20563051251332421>.
- [6] Freelon, D., Marwick, A., & Kreiss, D. (2020). False equivalencies: Online activism from left to right. *Science*, *369*, 1197 - 1201. <https://doi.org/10.1126/science.abb2428>.
- [7] Graham, J., Haidt, J., & Nosek, B. (2009). Liberals and conservatives rely on different sets of moral foundations. *Journal of Personality and Social Psychology*, *96*(5), 1029–1046.
- [8] Greig, M., & Hogg, R. (2025). 'Unfollow Them!': The Role of Morality- and Emotion-Related Factors in the Cancelling Process. *Human Behavior and Emerging Technologies*. <https://doi.org/10.1155/hbe2/7144903>.
- [9] Hidayat, A., & Sari, R. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Keadilan Sosial di Era Cancel Culture. *Jurnal Psikologi Sosial*, *8*(2), 77–89.
- [10] Hogg, M. (2016). Social Identity Theory. , *4*, 3-17. https://doi.org/10.1007/978-3-319-29869-6_1.
- [11] Huddy, L. (2001). From Social to Political Identity: A Critical Examination of Social Identity Theory. *Political Psychology*, *22*, 127-156. <https://doi.org/10.1111/0162-895x.00230>.
- [12] Jost, J. T., Federico, C. M., & Napier, J. L. (2009). Political ideology: Its structure, functions, and elective affinities. *Annual Review of Psychology*, *60*, 307–337.
- [13] Jost, J. T., Glaser, J., Kruglanski, A. W., & Sulloway, F. J. (2003). Political conservatism as motivated social cognition. *Psychological Bulletin*, *129*(3), 339–375.
- [14] Kubin, E., & Von Sikorski, C. (2021). The role of (social) media in political polarization: a systematic review. *Annals of the International Communication Association*, *45*, 188 - 206. <https://doi.org/10.1080/23808985.2021.1976070>.
- [15] Mael, F. A., & Ashforth, B. E. (1992). Alumni and their alma mater: A partial test of the reformulated model of organizational identification. *Journal of Organizational Behavior*, *13*(2), 103–123.

- [16] Matradewi, N. (2024). The Phenomenon Of 'Cancel Culture' In Indonesia: Between Ethics, Social, And Politics In Digital Space. *Socious Journal*. <https://doi.org/10.62872/x6p8zw03>.
- [17] Norris, P. (2021). Cancel Culture: Myth or Reality?. *Political Studies*, 71, 145 - 174. <https://doi.org/10.1177/00323217211037023>.
- [18] Nugroho, D. (2021). Cancel Culture di Era Digital: Antara Keadilan Sosial dan Polarisasi Publik. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 12(3), 45–58.
- [19] Nurfitriani, N. (2025). Cancel Culture among Indonesian Muslims on Social Media. *Digital Muslim Review*. <https://doi.org/10.32678/dmr.v2i2.54>.
- [20] Pérez, J. A., & Mugny, G. (2018). Social influence and social change: Revisiting Serge Moscovici's ideas in the context of moral and political issues. *Journal for the Theory of Social Behaviour*, 48(1), 36–51.
- [21] Purnama, R. (2022). Budaya Cancel Culture di Media Sosial Indonesia. *Komunika: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 12–25.
- [22] Putri, V., Octavia, I., Nuryanto, H., & Nurhajati, L. (2024). Comparison Study on Cancel Culture as an Impact and Public Figure Scandal in Indonesia and Overseas. *Communicare: Journal of Communication Studies*. <https://doi.org/10.37535/1010111202410>.
- [23] Reinig, L., Heath, R., & Borda, J. (2023). Rethinking polarization: Discursive opening and the possibility for sustaining dialogue. *Communication Monographs*, 90, 181 - 204. <https://doi.org/10.1080/03637751.2022.2164320>.
- [24] Soral, W., Bilewicz, M., & Winiewski, M. (2018). Exposure to hate speech increases prejudice through desensitization. *Aggressive Behavior*, 44(2), 136–146.
- [25] Tajfel, H., & Turner, J. C. (1986). The social identity theory of intergroup behavior. In S. Worchel & W. G. Austin (Eds.), *Psychology of intergroup relations* (pp. 7–24). Chicago: Nelson-Hall.
- [26] Tandoc, E., Ru, B., Huei, G., Charlyn, N., Chua, R., & Goh, Z. (2022). #CancelCulture: Examining definitions and motivations. *New Media & Society*, 26, 1944 - 1962. <https://doi.org/10.1177/14614448221077977>.
- [27] Velasco, J. (2020). You are Cancelled: Virtual Collective Consciousness and the Emergence of Cancel Culture as Ideological Purgings. *Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities*, 12. <https://doi.org/10.21659/rupkatha.v12n5.rioc1s21n2>.
- [28] Walters, G., & Bolger, P. (2018). Procedural justice perceptions, legitimacy beliefs, and compliance with the law: a meta-analysis. *Journal of Experimental Criminology*, 1-32. <https://doi.org/10.1007/s11292-018-9338-2>.
- [29] Werner, H., & Marien, S. (2020). Process vs. Outcome? How to Evaluate the Effects of Participatory Processes on Legitimacy Perceptions. *British Journal of Political Science*, 52, 429 - 436. <https://doi.org/10.1017/s0007123420000459>.
- [30] Yaqinah, S., & Antok, I. (2024). ANALYSIS OF ISLAMIC COMMUNICATION ABOUT OXYMORA CANCEL CULTURE ON VIRTUAL MEDIA IN INDONESIA. *al-Balagh: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*. <https://doi.org/10.22515/albalagh.v9i2.9569>.